



**PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA
(PPDI)**

Nomor : 017/KEP/RAKERNAS-PPDI/2026

**TENTANG
KEPUTUSAN REKOMENDASI
RAPAT KERJA NASIONAL
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA
(PPDI)
TAHUN 2026**

- Rapat Kerja Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia,
- Menimbang : a. bahwa Rapat Kerja Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia perlu diselenggarakan dengan lancar dan tertib;
b. bahwa untuk merumuskan rencana kerja Persatuan Perangkat Desa Indonesia perlu ditetapkan Rekomendasi Rapat Kerja Nasional.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Persatuan Perangkat Desa Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perangkat Desa Indonesia
- Memperhatikan : Pendapat dan saran dari peserta Rapat Kerja Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA TENTANG REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA NASIONAL PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA TAHUN 2026**
- Kesatu : Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Badan Kepegawaian Negara.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juni 2026

**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA**



Ketua Umum

SARJOKO, S.H., M.I.P.

Sekretaris Jenderal

MUHAMMAD NUH, S.E.



**REKOMENDASI
RAPAT KERJA NASIONAL
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA**

Dengan ini Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) sebagai bentuk representasi dan guna memperjelas status Kepegawaian Perangkat Desa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional dengan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperjelas status kepegawaian Perangkat Desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia mengusulkan agar Perangkat Desa tercatat dalam Badan Kepegawaian Negara sebagai Pegawai Aparatur Pemerintah Desa.
2. Mendesak kepada Pemerintah melalui kementerian terkait dan Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan permasalahan keterlambatan Penghasilan Tetap Perangkat Desa yang terjadi di beberapa daerah.
3. Jaminan Kesehatan, tetap diberikan kepada Perangkat Desa yang sudah purna.
4. Mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi adanya beasiswa khusus bagi anak-anak Perangkat Desa yang kuliah di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
5. Mengusulkan agar dimasukkannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri berupa Tunjangan Hari Raya (THR) dan Penghasilan Tetap ke-13.

Demikian rekomendasi ini dibuat bersama untuk menjadikan perhatian dan kerjasama dari semua pihak.

PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA

Ketua Umum


SARJOKO, S.H., M.IP.

Sekretaris Jenderal


MUHAMMAD NUH, S.E.